Problematika Pemeriksaan Terdakwa di Pengadilan Tanpa Dampingan Penasehat Hukum

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)

Moh. Fadhil dan Mochammad Imam Ghiffary

Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email: mf5932133@gmail.com

Abstrak

Prinsip *Miranda Rules* merupakan prinsip fundamental yang imperatif sifatnya di dalam prosedur peradilan pidana. Prinsip tersebut melekat pada hak-hak tersangka atau terdakwa sebagai bagian dari manusia seutuhnya. Salah satu yang menjadi bagian dari prinsip tersebut adalah adanya hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum yang dibarengi dengan kewajiban penegak hukum untuk menyediakan akses bantuan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHAP. Namun, implementasi pasal 56 KUHAP belum sepenuhnya ditegakkan. Salah satunya di Pengadilan Negeri Sungguminasa melalui Putusan Nomor 03/Pid.B/2015/PN.Sgm yang di dalamnya menyebutkan bahwa terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dikarenakan terdakwa menolak pendampingan hukum. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengungkapkan alasan terdakwa yang menolak didampingi oleh penasehat hukum dan juga untuk menjawab faktor-faktor yang menyebabkan terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penggabungan antara penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan menganalisisnya secara kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa berdasarkan perkara *a quo* terdakwa menolak didampingi penasehat hukum dikarenakan pandangan terdakwa yang konotatif terhadap eksistensi penasehat hukum bagi kepentingannya sehingga Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa merasa kewajiban Pasal 56 KUHAP menjadi gugur. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum adalah terbitnya SP2DPH sejak saat penyidikan berlangsung, pemahaman konotatif terdakwa mengenai penasehat hukum, kekuatan daya mengikat norma di dalam Pasal 56 KUHAP rendah, kurangnya koordinasi antara Pengadilan dengan Posbakum, pandangan aparat penegak hukum yang masih memandang inferior profesi advokat.

Kata Kunci: Miranda Rule; Pasal 56 ayat (1) KUHAP; Penasehat Hukum, Terdakwa, Pengadilan Negeri Sungguminasa

Abstract

The Miranda Rule is the fundamental principle which imperatively exist in criminal procedure. The principle is inherent in the rights of the suspect or defendant as part of a whole person. One of the principle is the right to counsel that obligating law enforcers to provide legal aid as article 56 KUHAP. However, the implementation of article 56 KUHAP has not been fully enforced. One of which is in Sungguminasa District Court through the court's ruling no. 03/Pid.B/2015/PN.Sgm. This verdict stated that the defendant was not accompanied by a law attorney. Therefore, this research wants to reveal the reason of defendant who refusing law attorney during the trial process. Moreover, this research also wants to reveal the factors that caused the defendant who was not accompanied by a law attorney. The method of this research is mixed research that involves normative research and juridical empirical research. The nature of this research is descriptive by analyzing qualitatively. The result of this research reveals that the defendant based on the case refused to exercise his rights because he had a conotative view about the existence of law attorney for him so that, the distric court's judge felt the obligation as stipulated in article 56 KUHAP were come off. Then, the factors influencing the defendant not accompanied by a law attorney are the issuance of SP2DPH rule since the investigation took place, incorrect understanding about law attorney, the binding power of article 56 KUHAP is not actually forced, lack of coordination between the Distric Court and the Legal Aid Office and the view of law enforcer who viewing law attorneys are not obligatory in criminal procedure.

Keywords: *Miranda Rule; Article 56 KUHAP; Law Attorney, Defendant, Sungguminasa Distric Court*

PENDAHULUAN

Gagasan lahirnya negara hukum tidak lepas dari adanya tuntutan terhadap batasan-batasan kekuasaan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia (HAM). Baik gagasan yang dikemukakan oleh Stahl maupun A.V. Dicey memiliki korelasi pada satu titik yakni ketiadaan kekuasaan yang sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*) agar pemenuhan HAM tetap terlindungi.¹ Konsekuensi logis dari lahirnya negara hukum adalah adanya sistem peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial and impartiality*) dengan mengedepankan persamaan di hadapan hukum (*equality before the*

¹Askari Razak, *Hukum Pelayanan Publik* (Makassar: Arus Timur, 2013), hlm. 19.

law) sebagai hak fundamental yang dimiliki oleh warga negara di dalam konstitusi (*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945).²

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan di dalam konstitusi memiliki tugas yang berat dalam proses pembangunan hukum. Salah satu aspek pembangunan hukum adalah proses peradilan yang *fair trial*. Sebelum diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keadaan proses peradilan pidana di Indonesia menggunakan sistem *inquisitoir*. Tersangka merupakan obyek pemeriksaan yang justru berada pada keadaan yang tidak menguntungkan karena ketidakmampuannya dalam melakukan pembelaan diri. Sulitnya akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan penasehat hukum menyebabkan tersendatnya akses terhadap keadilan bagi dirinya (*access to justice*) dan ketimpangan akses untuk mendapatkan peradilan yang adil dan berimbang (*fair trial and impartiality*).³

Ketiadaan pendampingan hukum yang dilakukan oleh advokat pada masa itu menciptakan kecenderungan aparat penegak hukum untuk berlaku sewenang-wenang (*detournement de pouvoir*). Kondisi tersebut berimplikasi pada tindakan negara yang telah menderogasi hak-hak fundamental tersangka atau terdakwa.⁴ Tuntutan untuk menghadirkan peradilan yang *fair trial* oleh Packer digambarkan dalam konsep *due process model*. Konsepsi tersebut mengutamakan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) sebagai poros utama proses peradilan yang berimbang. Kedudukan advokat sebagai penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa adalah unsur esensial yang mampu menopang keseimbangan proses peradilan yang *fair trial*.⁵

Sejalan dengan diberlakukannya KUHAP, kedudukan advokat mulai mendapat tempat yang istimewa. Namun, kedudukannya barulah sejajar dengan seluruh komponen subsistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) setelah lahirnya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Pasal 5 menyatakan bahwa advokat merupakan bagian dari penegak hukum. Urgensi masuknya advokat ke dalam subsistem peradilan

²H. R. Ridwan, *Hukum administrasi negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 3.

³Nikolas Simanjuntak, *Acara pidana Indonesia dalam sirkus hukum*, Cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 115.

⁴Sahuri Lasmadi, "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum," *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2, hlm. 69.

⁵Herbert L. Packer, *The Limit of the Criminal Sanction* (United States: Stanford University Press, 1968).

pidana tidak lepas dari peran dan kedudukan advokat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Lahirnya KUHAP sebagai karya fundamental yang mengelaborasi nilai-nilai HAM sebagai hak yang fundamental menempatkan posisi tersangka atau terdakwa pada posisi yang ideal sebagai bentuk penghormatan negara atas kedudukannya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan (*entity and dignity as a human being*).⁶

Reposisi tersangka atau terdakwa pada posisi yang ideal di mata hukum berkelindan dengan hak-hak tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum. Pandangan universal mengenai urgensi pendampingan hukum bagi tersangka atau terdakwa oleh advokat sebagai penasehat hukum dimulai dari adanya kasus *Miranda Vs Arizona* yang di putuskan oleh Mahkamah Agung di Amerika Serikat (*Supreme Court*) tahun 1966 yang kemudian dikenal sebagai *Miranda Warning*. Kasus *Miranda* kemudian diformulasikan ke dalam *the fifth amendment to the United States Constitution* yang dikenal sebagai prinsip *non-self incrimination*.⁷ Prinsip tersebut juga diadopsi ke dalam KUHAP sebagai acuan bagi aparat penegak hukum dalam memperlakukan tersangka pada proses penyidikan. Prinsip tersebut kemudian sejalan dengan pemberian hak bagi tersangka atau terdakwa untuk dapat didampingi oleh penasehat hukumnya.

Prinsip *Miranda Warning* atau *Miranda Rule* juga diadopsi di Indonesia ke dalam Pasal 54, 55, 56 dan Pasal 57 KUHAP. Ketentuan tersebut menjadi dasar legitimasi kedudukan advokat sebagai penasehat hukum di dalam sistem peradilan pidana. Meskipun kedudukannya tidak secara eksplisit dijelaskan namun, kedudukan penasehat hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berjalannya proses peradilan. UU Advokat kemudian hadir untuk melegitimasi secara eksplisit kedudukan advokat di dalam sistem peradilan pidana. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) hadir untuk menyempurnakan kedudukan advokat di dalam sistem peradilan pidana. Pasal 38 ayat (1) menjelaskan bahwa terdapat badan-badan lain yang fungsinya inheren dengan kekuasaan kehakiman. Fungsi yang dimaksud oleh badan-badan tersebut diuraikan di ayat (2) yakni fungsi penyelidikan dan

⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, Ed. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

⁷Stephen J. Schulhofert, "Reconsidering *Miranda*," *The University of Chicago Law Review* 54, no. 2 (1987), hlm. 436.

penyidikan, fungsi penuntutan, fungsi pelaksanaan putusan, fungsi pemberian jasa hukum dan fungsi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Secara yuridis dapat diinterpretasikan bahwa fungsi jasa hukum dan fungsi penyelesaian sengketa selaras dengan kedudukan advokat sebagai badan yang berwenang melaksanakan pemberian jasa hukum dan penyelesaian sengketa. Menurut Patriosa, selain memberikan jasa hukum dan penyelesaian sengketa, advokat juga berperan dalam menyeimbangkan proses peradilan. Jika jaksa penuntut umum merupakan perwakilan negara dalam menguji adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pidana maka advokat merupakan perwakilan negara dalam menjaga dan melindungi marwah negara dari tindakan sewenang-wenang (*arbitrary power*). Advokat (dalam perkara pidana berperan sebagai penasehat hukum) menjadi penyeimbang yang menjaga dan melindungi hak-hak warga negara yang tersandung masalah hukum agar proses pembuktian yang dilakukan oleh masing-masing pihak dapat berimbang di mata pengadilan.⁸

Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, tersangka atau terdakwa yang didakwa dengan ancaman pidana mati dan ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu untuk membayar seorang penasehat hukum yang didakwa dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih, pejabat yang bersangkutan pada seluruh proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa.⁹

Pasal 56 ayat (1) KUHAP di atas menjadi dasar legitimasi adanya kewajiban didampingi oleh penasehat hukum jika tersangka atau terdakwa diancam dengan pidana mati atau lima belas tahun dan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana lima tahun tetapi, tidak mampu untuk membayar penasehat hukum. Pejabat pada seluruh tingkatan peradilan wajib untuk menyediakan akses penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa (*access to justice*). Rumusan pasal tersebut sudah sangat jelas memberikan kewenangan secara atributif kepada seluruh pejabat di lingkungan peradilan. Namun, pada praktiknya masih terdapat terdakwa yang tidak diberikan pendampingan penasehat hukum bagi dirinya di dalam sidang pengadilan. Kondisi tersebut bukan hanya menerobos ketentuan Pasal 56 ayat (1)

⁸Pandji Patriosa, "Urgensi Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum: Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Edisi Maret (2015).

⁹Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, hlm. 338.

KUHAP sebagai prinsip *Miranda Rules* yang berlaku universal tetapi juga telah mendegradasi asas peradilan yang *fair trial*.

Hal ini bisa dilihat pada Putusan Nomor 03/Pid.B/2015/PN.Sgm yang pokoknya ditemukan fakta bahwa terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukumnya. Padahal terdakwa dijerat dengan dakwaan kumulatif dengan masing-masing ancaman pidananya yakni dua belas tahun penjara pada Dakwaan Kesatu (Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2) dan ancaman pidana sepuluh tahun penjara (Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam) pada Dakwaan Kedua. Oleh karena bentuk dakwaannya kumulatif maka ancaman pidananya telah melebihi batas lima tahun sebagaimana rumusan Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, kewajiban pejabat di lingkungan peradilan termasuk bagi hakim yang memeriksa perkara *a quo* dalam menunjuk penasehat hukum adalah sebuah keniscayaan.

Akan tetapi, justru keadaan tersebut tidak dilakukan oleh majelis hakim yang tetap melanjutkan proses persidangan sampai dengan tahap putusan akhir. Dalam pertimbangannya, yang menjadi dasar tidak adanya penasehat hukum dikarenakan terdakwa justru menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum. Kondisi tersebut merupakan problematika hukum yang membutuhkan peran majelis hakim dalam menjawab fenomena-fenomena yang terjadi agar tidak mereduksi sisi keadilan dan aspek HAM bagi diri terdakwa. Majelis hakim memiliki aspek intelektualitas, kognisi pengetahuan hukum yang mumpuni dan kebijaksanaan yang inheren di dalam dirinya (*homo juridicus*) untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya kedudukan penasehat hukum dalam proses penyelesaian perkara bagi kepentingan terdakwa agar sejalan dengan asas *fair trial*.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan mengenai mengapa terdakwa tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana di dalam perkara *a quo* ? Kemudian faktor-faktor apa yang menyebabkan terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum di dalam proses sidang pengadilan? Adapun penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Bagus Subekti dengan judul “Keabsahan Penggunaan Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasehat Hukum Pada Tingkat Penyidikan Perkara Narkoba Di Polresta Pontianak Berdasarkan Pasal 56 KUHAP. Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu, obyek penelitiannya

¹⁰Arbijoto, *Kebebasan Hakim: Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Diadit Media, 2010), hlm. 14.

adalah terbitnya surat pernyataan penolakan didampingi oleh penasehat hukum di tingkat penyidikan (*preadjudication*). Sementara obyek kajian peneliti adalah adanya putusan pengadilan yang terdakwanya tidak didampingi oleh penasehat hukum (*adjudication*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penggabungan antara penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan menganalisisnya secara kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data data primer yaitu hasil observasi di lapangan (Pengadilan Negeri Sungguminasa) dan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa. Data sekunder dengan kategori bahan hukum primer berupa Putusan nomor 03/Pid.B/2015/PN.Sgm dan Peraturan Perundang-undangan terkait di dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder berupa yurisprudensi, buku-buku, jurnal-jurnal dan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana tidak lepas dari perannya sebagai penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa. Pasal 56 KUHAP menjadi dasar legitimasi eksistensi penasehat hukum di dalam sistem peradilan pidana. Sebagai subsistem peradilan pidana, sudah seharusnya peran penasehat hukum diperkuat agar tercipta proses penyelesaian perkara pidana yang menjunjung tinggi HAM sebagai bentuk moralitas hukum dan supremasi hukum sebagaimana yang telah digariskan di dalam prosedur hukum acara pidana yang berlaku (*due process*).

1. Pasal 56 KUHAP dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana

Pasal 56 ayat (1) KUHAP memiliki korelasi dengan kewajiban institusional penegak hukum. Rumusan pasal tersebut adalah kewajiban yang sifatnya kontinuitas dalam konteks integrasi sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*). Kewajiban hukum tersebut dimulai dari tingkat penyidikan oleh penyidik kepolisian, tingkat penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan tingkat pengadilan oleh majelis hakim. Selain itu, kewajiban tersebut melekat pada kewajiban advokat yang disebut sebagai *mandatory pro bono*.

Dalam konteks negara hukum, kewajiban negara untuk menjamin akses keadilan (*access to justice*) bagi masyarakatnya adalah sebuah keniscayaan. Pemenuhan HAM harus sejalan dengan gagasan yang dibangun dalam

kerangka sistem hukum (*legal system*). Oleh karenanya, negara hukum hadir dalam menciptakan sistem hukum yang progresif dan menjunjung tinggi prinsip *equality before the law*. Dalam kerangka bantuan hukum (*legal aid*), negara mulai menyadari urgensi dan eksistensi advokat di dalam sistem peradilan pidana. Bantuan hukum (*legal aid*) merupakan perangkat yang dimiliki oleh advokat untuk dapat menyeimbangkan berjalannya proses peradilan pidana.

Sebagaimana pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, kewajiban negara dalam menjamin akses keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur sistem peradilan pidana yang humanis dan progresif. Administrasi peradilan harus dibangun secara berimbang dengan hadirnya keterlibatan advokat di dalamnya. Jaminan tersebut tidak hanya dalam bentuk pemenuhan HAM semata, lebih dari itu adalah jaminan persamaan di hadapan hukum bagi masyarakat kelas menengah ke bawah (*equality before the law*). *Pro bono* merupakan instrumen yang dimiliki oleh advokat dalam menjalankan panggilan kewajiban moralnya (*moral obligation*). Meskipun demikian, instrumen *pro bono* tidak cukup hanya dengan mengandalkan adanya kewajiban moral dan rasa keadilan yang kuat (*moral obligation and good will*). Lebih dari itu, implementasi *pro bono* memerlukan kolaborasi institusional dalam kerangka sistem peradilan pidana.¹¹

Meskipun advokat telah resmi masuk dalam subsistem peradilan pidana namun, eksistensi advokat sebagai penasehat hukum di dalamnya masih dianggap sebelah mata. Hal ini dapat ditelaah di dalam KUHAP bahwa eksistensi penasehat hukum merupakan hak bagi tersangka atau terdakwa sedangkan kewajiban pendampingan hukum oleh penasehat hukum hanya terbatas pada kondisi-kondisi yang tertera di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Kewajiban hukum aparat penegak hukum sebagaimana rumusan Pasal 56 ayat (1) KUHAP justru pada praktiknya masih terdapat kondisi yang kontraproduktif dengan rumusan Pasal 56 ayat (2) KUHAP sebagai kewajiban *pro bono* bagi advokat selaku penasehat hukum. Misalnya Subekti mengungkapkan adanya konsensus yang dibangun dalam proses penyidikan yang justru melanggar asas *fair trial* dan asas legalitas KUHAP. Pada proses penyidikan di Polresta Pontianak, Subekti mengungkap bahwa telah terjadi

¹¹Steven Lubet dan Cathryn Stewart, "Public Assets Theory of Lawyer's Pro Bono Obligation," *University of Pennsylvania Law Review* 145, no. 5 (1997), hlm. 1261.

pelanggaran terhadap prosedur formal beracara (*undue process*) dengan diterbitkannya Surat Pernyataan Penolakan Didampingi oleh Penasehat Hukum (SP2DPH).¹² Keberadaan SP2DPH adalah bentuk celah aparat penegak hukum dalam mengeliminir kewajiban hukumnya sebagaimana di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Ironisnya, terbitnya SP2DPH pada proses penyidikan justru diterima sebagai suatu konsensus hukum pada seluruh proses peradilan pidana hingga ke tahap sidang pengadilan.

Putusan Pengadilan Negeri kerap mengakomodir validitas keabsahan hukum SP2DPH. Munculnya SP2DPH merupakan irasionalitas yang telah dibangun demi menggugurkan kewajiban hukum aparat penegak hukum terhadap ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Kondisi tersebut justru mendegradasi eksistensi penasehat hukum sebagai bagian integral di dalam subsistem peradilan pidana. Pada putusan *a quo*, majelis hakim secara tegas menyatakan bahwa terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum. Majelis hakim tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai ketiadaan penasehat hukum yang mendampingi terdakwa selama proses persidangan berlangsung. Padahal, terdakwa dijerat dengan dakwaan pidana pencurian dengan pemberatan yakni Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara. Selain itu, fakta bahwa terdakwa belum memiliki pekerjaan menjadi relevan dengan syarat untuk mendapatkan akses bantuan hukum. Ancaman dua belas tahun penjara dan kondisi terdakwa yang belum memiliki pekerjaan sudah memenuhi *legal formal* yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa sebagaimana di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

2. Keinginan Terdakwa yang Tidak Ingin Didampingi Penasehat Hukum sebagai Suatu Problematika Hukum

Dalam perkara *a quo*, ternyata majelis hakim sudah memberikan akses bantuan hukum bagi terdakwa mengingat di Pengadilan Negeri Sungguminasa terdapat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pemeriksaan perkara. Namun, terdakwa berkeinginan untuk tidak didampingi oleh penasehat hukum. Hakim Amiruddin Mahmud (Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa) selaku *interviewee* mengungkapkan bahwa sering terjadi adanya terdakwa yang tidak

¹²Bagus Subekti, "Keabsahan Penggunaan Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasehat Hukum Pada Tingkat Penyidikan Perkara Narkoba Di Polresta Pontianak Berdasarkan Pasal 56 KUHAP," *Jurnal Nestor Magister Hukum* 2, no. 2 (2017): hlm. 4-5.

didampingi oleh penasehat hukum dikarenakan hal tersebut merupakan keinginan terdakwa. Oleh karena itu, hasil wawancara dengan *interviewee* akan menjelaskan mengenai kondisi yang terjadi sebagaimana di dalam perkara *a quo*.

Pertama, interviewee menjelaskan secara normatif pemahaman para hakim terkait penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

“Pengadilan sebagai salah satu komponen dari kekuasaan kehakiman memiliki kewajiban untuk menyediakan akses bantuan hukum kepada terdakwa. Dalam kondisi-kondisi tertentu, hakim diwajibkan untuk menyediakan akses bantuan hukum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP dalam hal: (1) Terdakwa diancam pidana mati sedangkan terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum; (2) Terdakwa diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih pidana penjara sedangkan terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum; dan (3) Terdakwa berada pada keadaan ekonomi yang tidak mampu untuk dapat menunjuk penasehat hukumnya sendiri, sedangkan dirinya diancam dengan pidana lima tahun atau lebih pidana penjara.”

Kedua, masalah kurangnya kesadaran hukum dan pengetahuan hukum yang dimiliki oleh terdakwa mengenai arti pentingnya bantuan hukum. beliau menjelaskan bahwa:

“Pada dasarnya, di seluruh pengadilan negeri dalam mengadili perkara pidana, hakim terikat pada standar operasional prosedur mengenai urgensi pemberian hak-hak terdakwa di dalam sidang pengadilan. Sebelum memeriksa perkara, hakim terlebih dahulu menanyakan identitas terdakwa, pemahaman terdakwa akan perkaranya, kesiapan terdakwa mengikuti persidangan dan penasehat hukum terdakwa. Jika terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum sedangkan kondisi terdakwa diancam dengan pidana mati atau lima belas tahun atau lebih pidana penjara atau pidana lima tahun atau lebih dan terdakwa berada pada tingkat ekonomi tidak mampu, hakim diwajibkan untuk menerangkan mengenai hak-hak terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum dan memberikan penjelasan bahwa di Pengadilan Negeri Sungguminasa telah ada Posbakum sebagai bentuk akses keadilan bagi terdakwa akan hak-haknya di persidangan. Namun, dalam praktiknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, para hakim kerap menemukan terdakwa tidak didampingi oleh

penasehat hukum. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman terdakwa mengenai arti pentingnya keberadaan penasehat hukum bagi mereka. Selain itu, sebagian besar merasa bahwa keberadaan penasehat hukum tidak efektif dan tidak signifikan dalam proses penyelesaian kasus mereka. Mereka menganggap bahwa adanya penasehat hukum akan memperlambat proses penyelesaian kasus mereka. Apalagi jika terdakwa sudah mengakui perbuatannya sehingga terdakwa lebih menginginkan kepastian hukum secara cepat ketimbang asas kemanfaatan dan keadilan bagi mereka. Sebagaimana di dalam perkara *a quo*, terdakwa menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum. Majelis kemudian menanyakan alasan terdakwa yang tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum. Terdakwa kemudian menjelaskan bahwa keberadaan penasehat hukum hanya akan mempersulit proses persidangan dan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap perkaranya. Terdakwa yang sejak awal di proses penyidikan sudah mengakui perbuatannya, ingin agar segera diproses di persidangan agar bisa menjalani pemidanaan secara cepat. Oleh karena itu, terdakwa merasa kehadiran penasehat hukum hanya akan memperlambat proses penyelesaian perkaranya.”¹³

Dari hasil wawancara di atas, didapatkan gambaran bahwa seringkali terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dikarenakan adanya kultur hukum yang selama ini mengakar di lingkungan masyarakat setempat bahwa pendampingan oleh penasehat hukum tidak berdampak signifikan terhadap nasib terdakwa. Dalam perkara *a quo*, terdakwa memiliki keyakinan bahwa keberadaan penasehat hukum hanya akan memperlambat penyelesaian kasus dan membuat proses persidangan menjadi rumit. Selain itu, keberadaan penasehat hukum tidak berdampak kepada hasil putusan yang akan didapatkan oleh terdakwa.

Menurut *interviewee*, kultur hukum yang terbangun di alam fikiran terdakwa menjadi dasar pertimbangan bahwa terdakwa tidak ingin menggunakan haknya. Secara *a contrario*, hak yang tidak ingin digunakan oleh salah satu pihak berarti kewajiban pihak lain menjadi gugur dengan sendirinya. Menurut peneliti, pandangan tersebut adalah keliru. Sesungguhnya rumusan Pasal 56 ayat (1) tidak bisa diinterpretasikan bahwa

¹³Amiruddin Mahmud, Hasil Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa, 14 September 2017.

jika terdakwa tidak ingin menggunakan haknya maka kewajiban Hakim Pengadilan Negeri dalam memberikan akses bantuan hukum menjadi gugur.

Pandangan tersebut mengindikasikan bahwa paradigma yang terbangun di sebagian kalangan hakim secara diskursif mengenai Pasal 56 ayat (1) KUHAP berkelindan dengan hak yang dimiliki oleh terdakwa. Padahal pasal 56 ayat (1) KUHAP berada pada wilayah kewajiban hukum aparat penegak hukum, bukan pada tataran hak terdakwa yang dianggap fakultatif sifatnya. Jika merujuk pada Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 57 KUHAP, pandangan *interviewee* relatif sifatnya karena pasal-pasal tersebut berkuat pada wilayah hak terdakwa. Sementara itu, jika Pasal 54 KUHAP ditelaah lebih dalam, antara Pasal 54 KUHAP dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP harus dapat dimaknai senafas secara kontinuitas antara hak yang dimiliki oleh terdakwa di satu sisi dengan kewajiban hukum aparat penegak hukum di sisi lain.

Pasal 54 KUHAP memberikan hak fundamental berupa akses bantuan hukum di dalam setiap proses peradilan. Di dalam Pasal 54 KUHAP, terdapat frasa “menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini” secara implisit merupakan asas legalitas yang menjadi pengikat bagi prosedur formal kewajiban pemberian akses bantuan hukum oleh aparat penegak hukum sebagaimana di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Artinya Pasal 56 ayat (1) KUHAP merupakan kewajiban yang tidak dapat didegradasi dalam kondisi apapun kecuali, kondisi sebagaimana tertuang di dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yakni dalam hal tidak adanya ketersediaan penasehat hukum maka kewajiban aparat penegak hukum dapat dikesampingkan demi tercapainya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan (*speedy trial*). Di Pengadilan Negeri Sungguminasa, masalah ketersediaan penasehat hukum tidak menjadi soal mengingat Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memiliki perangkat Posbakum sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam proses persidangan. Oleh karenanya, kewajiban hukum pengadilan dalam menunjuk penasehat hukum selaras dengan asas legalitas di dalam Pasal 54 KUHAP.

Dalam memahami konstruksi rumusan Pasal 54 *juncto* Pasal 56 ayat (1) KUHAP, terdapat gradasi hak bagi terdakwa dalam menggunakan hak bantuan hukum. Gradasi tersebut adalah hak terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum adalah fakultatif sepanjang tidak berkaitan dengan limitasi keadaan-keadaan yang dikonstruksikan di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Artinya, ketika kondisi terdakwa masuk dalam kategorisasi sebagaimana rumusan Pasal 56 ayat (1) KUHAP maka hak terdakwa tersebut menjadi imperatif yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum.

Sahetapy mengemukakan bahwa keberlakuan asas legalitas di dalam KUHAP mengindikasikan kedudukannya yang konstitutif limitatif. Artinya, rumusan pasal-pasal di dalam KUHAP harus sedapat mungkin tidak direduksi oleh aparat penegak hukum karena KUHAP adalah hukum prosedur yang berkaitan dengan proses pemenuhan HAM (*due process of law*).¹⁴ Oleh karena itu, kewajiban hukum majelis hakim dalam menunjuk penasehat hukum tidak dapat direduksi dengan alasan terdakwa tidak menginginkan didampingi oleh penasehat hukum, mengingat bahwa KUHAP tidak memberikan celah terhadap keadaan yang *a contrario* di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP kecuali hanya dalam keadaan tidak tersedianya penasehat hukum atau advokat di wilayah pengadilan hukum setempat.

Ketiga, masalah logika pemberian kuasa yang tidak berdasar. *Interviewee* kemudian melanjutkan gambarannya mengenai implementasi Pasal 56 ayat (1) KUHAP dengan logika hukum pemberian kuasa. Beliau menyatakan bahwa:

“Jika terdakwa tidak menginginkan didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana di dalam perkara *a quo*, hakim tidak dapat serta merta memaksakan terdakwa untuk menggunakan haknya. Oleh karena logika pemberian kuasa terdapat pada diri pemberi kuasa, yakni terdakwa itu sendiri. Sementara itu, jika terdakwa tidak menginginkan adanya pemberian kuasa kepada siapapun maka dengan sendirinya hak tersebut tidak dapat dipaksakan oleh pengadilan.”¹⁵

Menurut peneliti, alur berfikir *interviewee* adalah keliru jika Pasal 56 ayat (1) KUHAP dihubungkan dengan logika pemberian kuasa. Sebagaimana gradasi hak terdakwa dalam bantuan hukum, sepanjang kondisi terdakwa tidak termasuk di dalam rumusan Pasal 56 ayat (1) KUHAP maka hak terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum adalah fakultatif, sehingga terdakwa dapat untuk tidak memberikan kuasa kepada siapapun sebagaimana alur berfikir *interviewee*. Namun, kondisi tersebut berubah menjadi imperatif manakala kondisi terdakwa sejalan dengan rumusan Pasal 56 ayat (1)

¹⁴J. E. Sahetapy, *Runtuhnya etik hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm. 143.

¹⁵Mahmud, Hasil Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

KUHAP, sehingga yang perlu dilakukan oleh majelis hakim adalah memberikan pemahaman konstruktif kepada terdakwa mengenai peran pentingnya sosok penasehat hukum dalam proses persidangan. Hakim memiliki hak *ex officio* yang menjadi karakteristiknya.

Koordinasi antara majelis hakim, panitera dan Posbakum menjadi sangat urgensial dalam memberikan pemahaman konstruktif mengenai urgensi bantuan hukum bagi terdakwa. Disinilah letak urgensi kuasa pengetahuan yang dimiliki oleh majelis hakim dalam merekayasa kultur hukum terdakwa agar kekuasaan kehakiman dapat berjalan selaras dalam kerangka sistem peradilan pidana tanpa mereduksi eksistensi penasehat hukum di dalamnya. Menurut Syamsuddin, aparat penegak hukum memiliki peran yang besar dalam merekayasa kultur hukum masyarakat.¹⁶ Sebagaimana diungkapkan oleh Friedman bahwa struktur hukum (aparat penegak hukum) memiliki kuasa dalam merekayasa kultur hukum masyarakat.¹⁷

3. Perlunya Peran Majelis Hakim dalam Membangun Persepsi bagi Terdakwa terhadap Eksistensi Penasehat Hukum

Wignyosoebroto mengungkapkan bahwa seorang hakim bukanlah perangkat yang dirancang sebagai mesin yang penuh dengan logika semata dan bekerja secara mekanik layaknya corong undang-undang (*la bouche qui prononce le mots de lois*), melainkan manusia seutuhnya yang memiliki kewajiban moral dan kepekaan sosial terhadap kemanusiaan. Hakim dituntut untuk melakukan penalaran hukum dengan memadukan antara berfikir rasional dengan *moral reasoning*.¹⁸ Menurut Shidarta, penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim merupakan kegiatan yang berada pada dimensi berfikir secara problematis tersistematisasi. Problematis karena kegiatan berfikir seorang hakim dituntut untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang menjadi domain profesinya sehingga bersifat praktis. Tersistematisasi bertalian dengan pertimbangan hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Logika pemberian kuasa sebagaimana hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kegiatan berfikir hakim dalam

¹⁶M. Syamsudin, *Konstruksi baru budaya hukum hakim berbasis hukum progresif*, Ed. 1 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 51-52.

¹⁷Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 15.

¹⁸Syamsudin, *Konstruksi baru budaya hukum hakim berbasis hukum progresif*, hlm. 239.

menafsirkan implementasi Pasal 56 KUHAP tidak dilakukan dalam dimensi yang problematis tersistematis.

Pada dasarnya hakim memiliki kebebasan yang melekat secara institusional di dalam dirinya. Namun, kebebasan hakim tidak dapat diartikan sebagai kebebasan yang sewenang-wenang. Kebebasan hakim tidak dilakukan dalam rangka melakukan *contra legem*, bahkan kebebasan hakim adalah subordinat dari hukum itu sendiri.¹⁹ Menggugurkan kewajiban hukum atas dasar hak yang tidak digunakan bukanlah bagian dari kebebasan hakim, mengingat dimensi kebebasan hakim adalah subordinat dari hukum itu sendiri dalam hal ini adalah prosedur formal hukum acara pidana. Pada dimensi cara berfikir yang problematis tersistematisasi, hakim harus sedapat mungkin melihat problematika dan kultur hukum masyarakat setempat (*living law*) untuk kemudian diramu dalam dimensi berfikirnya. Di sini terlihat bahwa cara berfikir problematis tersistematisasi dapat menghasilkan pertimbangan hukum yang holistik menyentuh seluruh lapisan problematis tersebut. Hasilnya adalah lahirnya pertimbangan hukum hakim yang afirmatif terhadap konteks kenyataan sosial.

Pertimbangan yang afirmatif tersebut kemudian bertransformasi menjadi kuasa pengetahuan yang berfungsi merekayasa kultur hukum masyarakat. Misalnya, kuasa pengetahuan yang dimiliki oleh hakim sebagaimana asas *ius curia novit*, memiliki kontribusi besar dalam merekayasa kultur hukum masyarakat setempat yang sedang berperkara pidana mengenai arti penting eksistensi penasehat hukum di dalam sistem peradilan pidana. Hal tersebut merupakan afirmasi responsif terhadap kultur hukum masyarakat di sekitar wilayah hukumnya yang masih terjebak pada pandangan konservatif sehingga persepsi yang terbangun terhadap keberadaan penasehat hukum sangatlah konotatif. Oleh karenanya, peran hakim sangatlah urgen dalam membangun literasi bantuan hukum bagi terdakwa agar implementasi dari Pasal 56 ayat (1) KUHAP sejalan dengan nafas pemenuhan HAM dan asas *fair trial*.

Tentunya putusan hakim yang mereduksi ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP terkait dengan perkara *a quo* memiliki implikasi hukum yang patut dikaji lebih dalam. Merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 545 K/Pid.Sus/2011 menyatakan bahwa:

¹⁹Ahmad Kamil, *Filsafat kebebasan hakim*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 172.

“Bahwa selama pemeriksaan terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula.”²⁰

Selain itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 367 K/Pid/1998²¹ menyatakan bahwa:

“Bila tidak didampingi oleh penasehat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum...”

Berdasarkan kedua yurisprudensi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah sebuah keniscayaan yang melekat di dalam prosedur hukum acara (*due process of law*). Adapun keadaan penolakan terdakwa untuk tidak didampingi oleh penasehat hukum merupakan fenomena yang melekat dengan kultur hukum masyarakat. Fenomena tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menggugurkan kewajiban majelis hakim untuk menunjuk penasehat hukum dengan terlebih dahulu menjelaskan hak-hak terdakwa beserta edukasi mengenai arti pentingnya penasehat hukum di dalam proses persidangan.

Meskipun berdasarkan kedua yurisprudensi di atas hanya menyinggung masalah tidak didampingi oleh penasehat hukum selama proses penyidikan. Namun, harus dapat dimaknai juga mutatis mutandis dengan proses di sidang pengadilan. Oleh karena itu, terdapat kekhilafan hakim dalam menerapkan prosedur hukum acara terkait dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai ruh dari prinsip *Miranda Rules* sehingga berimplikasi pada putusan tersebut. Harahap menjelaskan bahwa prinsip *Miranda Rules* merupakan nilai HAM yang inheren di dalam diri manusia. Pengabaian terhadap prinsip *Miranda Rules* di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebabkan seluruh proses pemeriksaan tidak sah (*undue process*) dan batal demi hukum (*null and void*).²²

²⁰“Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Pid.Sus/2011” (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011).

²¹“Putusan Mahkamah Agung Nomor 367 K/Pid/1998” (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1998).

²²Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, hlm. 339.

4. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terdakwa tidak Didampingi oleh Penasehat Hukum

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dapat dikonstatasi oleh peneliti sebagai berikut. *Pertama*, keberadaan SP2DPH sebagai dasar hukum bagi aparat penyidik, penuntut umum dan hakim di sidang pengadilan untuk dapat menggugurkan kewajiban hukumnya. Dasar hukum penerbitan SP2DH adalah Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-570/F/Fpk/1/9/1994. Jika surat edaran tersebut dihadapkan dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, dapat disimpulkan bahwa kedudukan surat edaran yang dapat mereduksi implementasi Pasal 56 ayat (1) adalah bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferior*. Kedudukan surat edaran tidak dapat mendegradasi prosedur hukum acara yang sudah tegas dituangkan di dalam KUHAP.

Fungsi *beleid* tersebut hanya sebatas mengatur teknis administrasi peradilan pidana dan tidak dapat mendegradasi prosedur hukum di dalam KUHAP. Sehingga menjadikan surat edaran sebagai payung hukum dalam dalam menopang validitas keberlakuan SP2DH adalah bertentangan dengan hirarki perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kedua, pandangan konotatif masyarakat terhadap peran penasehat hukum dalam proses persidangan. Bahwa dalam hal ini peneliti melakukan observasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan selama observasi berlangsung, peneliti dapat mengkonstatasi gejala tersebut sebagai kultur hukum yang terbangun di sebagian besar masyarakat setempat. Agar kultur hukum tersebut dapat direkonstruksi pada tataran cara berfikirnya, dibutuhkan peran subsistem peradilan pidana dalam mengedukasi dan meningkatkan literasi fungsi penasehat hukum dalam memberikan akses keadilan dan bantuan hukum (*access to justice and legal aid*).

Pada domain non litigasi, Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sangatlah besar terkait dengan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat. Fungsi non litigasi LBH memiliki peran besar dalam merekayasa pemahaman hukum masyarakat melalui kuasa pengetahuan. Apalagi keberadaan LBH juga merebak di setiap kampus-kampus yang memiliki fakultas hukum. LBH kampus memiliki program nyata dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian integral Tri Dharma berbasis

pendidikan hukum kepada masyarakat (*community oriented to legal education*).²³

Kuasa pengetahuan dibutuhkan untuk merekayasa paradigma masyarakat agar tidak menafikan kedudukan asas kemanfaatan dan keadilan sebagai instrumen purposif bekerjanya hukum di tengah-tengah masyarakat. Jayadi menyebut domain ini sebagai bantuan hukum struktural. Menurut Jayadi, bantuan hukum struktural digunakan untuk merekonstruksi cara berfikir masyarakat akan arti pentingnya hukum dan perangkat hukum. Kesadaran hukum dibutuhkan agar paradigma konotatif tentang eksistensi penasehat hukum dapat direduksi dari alam berfikir masyarakat.²⁴ Pada domain litigasi, kuasa struktural harus sedapat mungkin korelatif dengan kuasa pengetahuan.

Ketiga, Pasal 56 ayat (1) KUHAP merupakan norma yang berbentuk perintah (*gebod*) namun, daya mengikat norma tersebut justru lemah. Hal ini dikarenakan perintah untuk menunjuk satu atau lebih penasehat hukum secara *a contrario* tidak memiliki implikasi hukum terhadap aparat penegak hukum yang tidak menjalankan perintah norma tersebut. Ketiadaan sanksi sebagai instrumen pengikat suatu norma menyebabkan daya mengikatnya rendah sehingga tingkat kepatuhan aparat penegak hukum juga rendah.

Keempat, masalah koordinasi antara pengadilan dengan Posbakum yang masih belum sejalan dalam mengimplementasikan Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Keberadaan Posbakum sebagaimana amanah UU Kekuasaan Kehakiman dan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan belum mampu menjawab problematika hukum sebagaimana di dalam perkara *a quo*. Hal ini menjadi penegas bahwa kualitas substansi hukum berkaitan prinsip *Miranda Rule* belum komprehensif menjawab keadaan-keadaan di lapangan.

Padahal menurut Friedman, kualitas sistem hukum bergantung pada kualitas subsistemnya. Struktur hukum akan berjalan baik manakala ditopang oleh kualitas substansi hukum, begitupula sebaliknya. Jika kualitas keduanya berjalan optimal maka akan memacu proses rekayasa kultur hukum yang baik

²³Fachrizar Afandi, "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access to Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 1 (t.t.): hlm. 40.

²⁴Ahkam Jayadi, "Peran Penasehat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan," *Jurisprudentie* 5, no. 2 (2018): hlm. 12.

sebagai proses input ke dalam subsistem dan proses output ke dalam kehidupan masyarakat. Substansi hukum merupakan bagian integral dari penegakan hukum *in abstracto* yang akan menopang kualitas dan mobilitas penegakan hukum *in concreto* di wilayah kerja struktur hukum.²⁵ Dengan demikian, tidak komprehensifnya formulasi prinsip *Miranda Rule* berimplikasi pada lahirnya surat edaran yang melegitimasi validitas keberlakuan SP2DH dalam kerangka kerja aparat penegak hukum dan lemahnya koordinasi pengadilan dengan Posbakum.

Selama proses observasi, peneliti melihat adanya kecenderungan bagi Posbakum untuk bergerak secara pasif menunggu perkara diberikan oleh Pengadilan. Tentunya kecenderungan tersebut berimplikasi pada akses keadilan (*access to justice*) yang kurang optimal berjalan. Jika pengadilan tidak memberikan akses perkara akibat terdakwa yang tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum maka Posbakum tidak dapat mengambil alih perkara tersebut. Kondisi seperti ini seharusnya dapat direkonsepsi bersama bahwa khusus mengenai implementasi Pasal 56 ayat (1) KUHAP, kedudukan Posbakum merupakan bagian dari struktur yang harus ada sejak awal perkara dilimpahkan ke Pengadilan. Posbakum harus dapat difungsikan secara aktif jika terdapat perkara yang masuk dan terdakwa tidak memiliki penasehat hukum.

Secara prospektif, pembaruan hukum acara pidana sudah mengarah pada *adversarial system* dan meninggalkan jauh model *iquisitoir*. Kedudukan penasehat hukum secara prospektif adalah berimbang dan berperan aktif dalam menguji alat bukti penuntut umum (*a charge*) sekaligus dapat bekerja maksimal dalam presentasi alat buktinya (*a de charge*).²⁶ Oleh karenanya, ke depan problematika dalam penelitian ini sudah sedapat mungkin dapat diminimalisir jika RKUHAP nantinya mampu membangun proses pendisiplinan paradigma dan daya kerja ke arah yang *adversarialsystem*. Sehingga, keberadaan Posbakum di Pengadilan tidak hanya menjadi pelengkap kekuasaan kehakiman, lebih dari itu merupakan bagian integral dari kekuasaan kehakiman.

²⁵Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2014).

²⁶Indriyanto Seno Adji, *KUHAP Dalam Prospektif* (Jakarta: Diadit Media, 2011), hlm. 27.

Kelima, paradigma inferioritas terhadap kedudukan penasehat hukum masih mengakar di dalam subsistem peradilan pidana. Dalam perspektif genealogis, pandangan Foucault mengenai pendisiplinan perlu menjadi bahan kajian dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum.²⁷ Dalam kerangka pembaruan sistem peradilan pidana (*criminal justice reform*), negara harus dapat membangun sistem yang dapat mengendalikan kerja-kerja aparat penegak hukum secara sinergis dan disiplin. Pada domain Pasal 54 KUHAP, hak terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum adalah fakultatif sehingga peran majelis hakim terbatas pada pemberitahuan kepada terdakwa untuk dapat mempergunakan haknya. Jika terdakwa tidak mengaktifkan hak tersebut berimplikasi pada gugurnya kewajiban majelis hakim. Sedangkan dalam domain Pasal 56 ayat (1) KUHAP, hak tersebut menjadi imperatif diberikan dengan atau tanpa persetujuan terdakwa. Hakim secara *ex officio* menunjuk langsung penasehat hukum yang berada di Posbakum untuk memberikan pendampingan hukum kepada terdakwa dan menjamin terselenggaranya asas *fair trial*.

Kesadaran majelis hakim akan pentingnya penasehat hukum sebagaimana Pasal 56 ayat (1) KUHAP merupakan bentuk kesadaran intelektual yuridisnya (*homo juridicus*). Hal ini dikarenakan penolakan terdakwa tidak memiliki rasionalitas dan dasar hukum yang kuat untuk dapat menggugurkan kewajiban majelis hakim dalam menunjuk seorang atau lebih penasehat hukum. Ketika kondisi terdakwa secara yuridis sesuai dengan limitasi di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP maka kewajiban majelis hakim dalam menunjuk penasehat hukum tidak dapat diikat oleh pernyataan majelis hakim kepada terdakwa mengenai hak-haknya. Akan tetapi *an sich* sebagai kewajiban pemenuhan standar prosedur hukum acara pidana (*due process of law*).

Kedudukan penasehat hukum di dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penyeimbang berjalannya proses peradilan. Kesadaran ini harus tampak di alam rasionalitas para hakim. Menurut Azmi, kedudukan penasehat hukum bahkan lebih jauh dari sekedar instrumen subsistem peradilan pidana. Penasehat hukum pada praktiknya kerap membantu hakim dalam setiap proses penemuan dan pembentukan hukum (*reactrinding*). Kemandirian seorang penasehat hukum serta adanya rasa keadilan yang

²⁷Michel Foucault, *Discipline and Punish, The Birth of the Prison* (United States: Vintage Books, 1995), hlm. 138.

melekat di dalam profesinya (*sense of justice*), membuat daya gerak dan daya jelajah penasehat hukum cenderung memiliki dimensi kedalaman pengetahuan ilmu hukumnya (*philosophical jurisprudence*) dalam mengonstatir adanya hubungan antara peristiwa hukum yang dialami terdakwa dengan fakta sosial disekitarnya.²⁸

Rasa keadilan sebagai manifestasi profesi advokat (penasehat hukum dalam perkara pidana), mengandung nilai moral dan etika sebagai asupan yang diinjeksi ke dalam pembuatan pledoinya sehingga kandungan pledoi penasehat hukum cenderung mampu menerobos cahaya gelap yang menyelimuti sulitnya pengungkapan suatu perkara. Sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), profesi advokat tidak dapat dipisahkan dari unsur etik profesinya. Hal ini dikarenakan profesi advokat, khususnya dalam kapasitas sebagai penasehat hukum sangat bertalian erat dengan ikatan kemanusiaan yang pada akhirnya akan melahirkan ketertiban masyarakat yang berkeadilan.²⁹ Disinilah letak peran penasehat hukum yang mampu memberikan arah menuju ditemukannya kebenaran materil di dalam setiap proses penyelesaian perkara pidana.

KESIMPULAN

Banyaknya perkara pidana yang hingga ke tahap sidang pengadilan terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum merupakan suatu problematika hukum yang kerap terjadi di lapangan. Berdasarkan Putusan Nomor 03/Pid.B/2015/PN.Sgm dapat ditelaah bahwa putusan tersebut dikeluarkan tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Hasil wawancara dengan *interviewee* di Pengadilan Negeri Sungguminasa dapat disimpulkan bahwa majelis hakim tidak memberikan akses penasehat hukum dikarenakan penolakan terdakwa akibat paradigma terhadap penasehat hukum secara konotatif. *Interview* menyimpulkan bahwa penolakan terdakwa berimplikasi pada gugurnya kewajiban pengadilan dalam mengimplementasikan Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Padahal rumusan pasal tersebut tidak memberikan celah untuk dapat menggugurkan kewajiban

²⁸Azmi Syahputra, "Fungsi dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum dan Penemu Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Prioris* 4, no. 3 (t.t.): hlm 289-290.

²⁹Putra Halomoan HSB, "Persoalan-Persoalan Pokok dalam Profesi Hukum di Indonesia," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): hlm. 280.

hukum bagi pengadilan dalam menyediakan penasehat hukum. Hakim memiliki peran yang strategis dalam merekayasa kultur hukum terdakwa agar dapat memahami arti pentingnya kedudukan penasehat hukum bagi kepentingan penyelesaian perkaranya sesuai dengan asas *fair trial*. Faktor-faktor yang menyebabkan kerap terjadi penolakan terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum adalah terbitnya SP2DPH pada proses penyidikan, terbangunnya kultur hukum yang konotatif di alam pikiran masyarakat terhadap keberadaan penasehat hukum, lemahnya koordinasi antara Pengadilan dengan Posbakum dan Paradigma Pengadilan yang masih menganggap keberadaan penasehat hukum di dalam proses persidangan bukan suatu kewajiban yang harus ada sehingga terjadi inferioritas.

Peneliti mengemukakan saran bahwa *pertama*, pendidikan hukum dalam bentuk diklat kehakiman harus sedapat mungkin tuntas dalam membangun kultur hukum dan paradigma hukum hakim agar terbangun pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur hukum acara. Hal ini untuk meminimalisir kekhilafan hakim dalam memimpin dan memutuskan suatu perkara. *Kedua*, dalam mengimplementasikan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, hakim harus bertindak selaku pemilik kuasa pengetahuan dan kuasa struktural untuk dapat merekayasa kultur hukum terdakwa yang menganggap penasehat hukum tidaklah penting di dalam sistem peradilan pidana agar hak-hak terdakwa terjamin oleh proses persidangan yang *fair trial*. *Ketiga*, Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-570/F/Fpk/1/9/1994 perlu diuji validitasnya karena bertindak resisten terhadap ketentuan di dalam KUHAP. *Keempat*, memaksimalkan fungsi non litigasi LBH baik LBH murni maupun LBH di dalam kampus yang memiliki program pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk Tri Dharma berbasis pendidikan hukum kepada masyarakat. *Kelima*, secara prospektif dibutuhkan regulasi yang dapat memperkuat daya mengikat norma di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP agar terdapat konsekuensi hukum bagi aparat penegak hukum yang tidak menjalankan kewajiban hukumnya. Hal ini dapat dilakukan melalui reformulasi KUHAP sebagai mekanisme jangka panjang dan melalui instrumen Peraturan Mahkamah Agung sebagai mekanisme jangka pendek yang dapat mengikat para hakim untuk tidak mengabaikan perintah di dalam KUHAP. Perma No. 1 Tahun 2014 menjadi urgen untuk direformulasi agar kedudukan Posbakum di Pengadilan dapat bersinergi dengan baik dalam koridor implementasi Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno. *KUHAP Dalam Prospektif*. Jakarta: Diadit Media, 2011.
- Afandi, Fachrizal. “Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access to Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum.” *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 1 (2013).
- Arbijoto. *Kebebasan Hakim: Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Diadit Media, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Foucault, Michel. *Discipline and Punish, The Birth of the Prison*. United States: Vintage Books, 1995.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Ed. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- HSB, Putra Halomoan. “Persoalan-Persoalan Pokok dalam Profesi Hukum di Indonesia.” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2017).
- Jayadi, Ahkam. “Peran Penasehat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan.” *Jurisprudentie* 5, no. 2 (2018).
- Kamil, Ahmad. *Filsafat kebebasan hakim*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012.
- Lasmadi, Sahuri. “Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum.” *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2014). <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2060>.
- Lubet, Steven, dan Cathryn Stewart. “Public Assets Theory of Lawyer’s Pro Bono Obligation.” *University of Pennsylvania Law Review* 145, no. 5 (1997).

- Mahmud, Amiruddin. Hasil Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa, 14 September 2017.
- Packer, Herbert L. *The Limit of the Criminal Sanction*. United States: Stanford University Press, 1968.
- Patriosa, Pandji. “Urgensi Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Hukum: Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, no. Maret (2015).
- “Putusan Mahkamah Agung Nomor 367 K/Pid/1998.” Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1998.
- “Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Pid.Sus/2011.” Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.
- Razak, Askari. *Hukum Pelayanan Publik*. Makassar: Arus Timur, 2013.
- Ridwan, H. R. *Hukum administrasi negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Sahetapy, J. E. *Runtuhnya etik hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Schulhofert, Stephen J. “Reconsidering Miranda.” *The University of Chicago Law Review* 54, no. 2 (1987).
- Simanjuntak, Nikolas. *Acara pidana Indonesia dalam sirkus hukum*. Cet. 1. Ciawi, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Subekti, Bagus. “Keabsahan Penggunaan Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasehat Hukum Pada Tingkat Penyidikan Perkara Narkoba Di Polresta Pontianak Berdasarkan Pasal 56 KUHAP.” *Jurnal Nestor Magister Hukum* 2, no. 2 (2017).
- Syahputra, Azmi. “Fungsi dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum dan Penemu Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Hukum Prioris* 4, no. 3 (2015).
- Syamsudin, M. *Konstruksi baru budaya hukum hakim berbasis hukum progresif*. Ed. 1. Jakarta: Kencana, 2012.